

ABSTRAK

Pada era reformasi ini, sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, tetapi tetap berada dibawah pengawasan pemerintah pusat untuk keutuhan NKRI. Setelah Otonomi Daerah kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Sehingga dalam penelitian ini yaitu untuk menganalisis sebuah derajat desentralisasi fiskal, kemandirian, efektifitas dan efisiensi keuangan daerah dalam 4 Kabupaten di Pulau Madura. Penelitian ini kuantitatif deskriptif dengan metode yang digunakan yaitu analisis rasio dan menggunakan jenis data sekunder berdasarkan instansi atau dinas terkait di 4 Kabupaten Pulau Madura.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kondisi keuangan daerah Pulau Madura pada tahun 2011-2015 secara rata-rata dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah masih rendah. Perbandingan tingkat kemandirian kemampuan keuangan daerah yaitu Kabupaten Pamekasan pada tingkat kemampuan kemandirian 13,03 % dengan pola hubungannya instruktif, dan efektifitasnya 81,10 % dengan kriteria cukup efektif, dan efisiensi keuangan daerah 97,6 % dengan kriteria kurang efisien. Kabupaten Sumenep kemandirian keuangan daerah masih instruktif pola hubungannya yaitu 9,86 %, dan tingkat efektifitasnya 94,43 % dengan kriteria efektif, dan kurang efisien kemampuan manajemen keuangannya sebesar 96,9 %. Kabupaten Bangkalan pada kemandirian keuangan daerah yaitu 10,9 % dengan kriteria instruktif pola hubungannya, dan tingkat efektifitas keuangan daerah kriteria efektif sebesar 93,39 %, dan tingkat efisiensi masih kurang efisien yaitu 92,9 % . Kabupaten Sampang termasuk kategori urutan paling akhir dalam tingkat sumber penerimaan PAD, dengan tingkat kemampuan kemandirian keuangan daerah pola hubungannya instruktif yaitu sebesar 9,96 %, dan tingkat efektifitasnya kriteria efektif dengan nilai rasio 93,98 %, tetapi masih kurang efisien manajemen keuangan daerah sebesar 97,7 %. Jadi Pulau Madura dalam 4 Kabupaten masih ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga pola hubungannya Instruktif dalam kemandirian keuangan daerah, walaupun rata-rata efektif dalam pelaksanaan program, akan tetapi masih kurang efisien dalam pengelolaan manajemen keuangan daerah. Sehingga dalam penerapan otonomi dan desentralisasi fiskalnya masih rendah.

Kata Kunci: *Otonomi Daerah, Keuangan Daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Kemandirian, Efektifitas, Efisiensi, Pulau Madura.*

ABSTRACT

In this era of reformation, a system of government is urgently needed enabling the rapid distribution of people's aspirations, but still in rein of supervision of the central government for the integrity of NKRI. After the Regional Autonomy independence of a region in national development is a part that can not be separated from the success of the policy decided by the government center. So, this research aims to analyze a degree fiscal decentralization, independence, effectiveness and efficiency of local finances in 4 Regency in Madura Island. This research is quantitative descriptive with the method used ie ratio analysis and using secondary data type based agencies or related agencies in 4 regencies of Madura Island.

Based on the results of research that the island's financial condition Madura in 2011-2015 on average in management local finance is still low. The comparison of level of ability independence the regional finance of Pamekasan Regency, the level of independence ability 13.03% with the pattern the relationship is instructive to the central government, and the effectiveness of 81.10% with criteria are quite effective in local government financial management performance, and the financial efficiency of the region 97,6% with criteria less efficient in management regional financial management. Sumenep Regency the ability of local financial independence is still instructive patterns its relationship to the central government with a ratio of 9.86%, performance local government financial management that is equal to 94.43% with criteria effective in the implementation of regional economic development programs, however less efficient in the management capability of regional financial management ie amounted to 96.9%. Bangkalan regency regional financial independence of 10.9% with the pattern of instructive criteria its relationship to the central government, and the effectiveness of management performance regional finance is still effective criteria that is equal to 93.39%, although the level efficiency is still less efficient in the management of local financial management with a ratio value of 92.9%. Sampang Regency is the most order category end in the revenue source level of PAD, with the level of local financial independence capacity is still instructive the pattern of its relationship to the central government of 9.96%, and level effectiveness indicates the effective criteria in the performance of local financial management with a ratio value of 93.98%, but still less efficient in management regional financial management that is 97.7%. So the island of Madura in 4 districts still dependence on central government assistance is higher than Local Revenue, so that the pattern of the relationship Instructive in self-reliance Regional finance, although an effective average in program implementation, will but still less efficient in the management of local financial management. So in the implementation of autonomy and fiscal decentralization is still low.

Keywords: *Regional Autonomy, Regional Finance, Degree of Fiscal Decentralization, Independence, Effectiveness, Efficiency, Madura Island.*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
GAMBAR GRAFIK	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan	11
1.4 Manfaat Penelitian	12
a. Manfaat Teoritis	12
b. Manfaat Praktis	13
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Landasan Teori	14
2.1.1 Teori Ekonomi Makro	14
2.1.2 Otonomi Daerah	16
2.1.3 Derajat Desentralisasi Fiskal	20
2.1.4 Tinjauan Keuangan Daerah	24
2.1.4.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	24
2.1.4.2. Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	26
2.1.4.2.1 PAD (Pendapatan Asli Daerah)	27
2.1.4.2.2 Dana Perimbangan	28
2.1.4.2.3 Retribusi Daerah	31
2.1.4.2.4 Pinjaman Daerah	33
2.1.4.2.5 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	34
2.1.5 Dasar-Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan	35
2.1.6 Pengelolaan Pengeluaran Daerah	37
2.1.7 Kemampuan Keuangan Daerah	38

2.1.8 Kemandirian Keuangan Daerah	39
2.1.9 Rasio Efektifitas	41
2.1.10 Rasio Efisiensi	42
2.1.11 Penelitian Terdahulu	43
2.1.12 Kerangka Pemikiran	49
BAB III	50
METODE PENELITIAN	50
3.1 Pendekatan Penelitian	50
3.2 Definisi Operasional	50
3.3 Subyek dan Obeyek Penelitian	52
3.4 Jenis dan Sumber Data	52
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	53
3.6 Teknik Analisis Data	53
BAB IV	58
HASIL DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian	58
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	60
4.2.1 Profil Kondisi Keuangan Daerah	60
4.2.2 Struktur Penerimaan Daerah Wilayah Pulau Madura	66
4.2.2.1 Struktur Penerimaan Daerah Kabupaten Sumenep yang tercermin dalam laporan APBD	66
4.2.2.2 Struktur Penerimaan Daerah Kabupaten Pamekasan yang tercermin dalam laporan APBD	70
4.2.2.3 Struktur Penerimaan Daerah Kabupaten Sampang yang tercermin dalam laporan APBD	75
4.2.2.4 Struktur Penerimaan Daerah Kabupaten Bangkalan yang tercermin dalam laporan APBD	79
4.2.3 Struktur Belanja Daerah Wilayah Madura	83
4.2.3.1 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Sumenep yang tercermin dalam laporan APBD	83

4.2.3.2 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan yang tercermin dalam laporan APBD	86
4.2.3.3 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Sampang yang tercermin dalam laporan APBD	90
4.2.3.4 Struktur Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan yang tercermin dalam laporan APBD	93
4.2.4 Struktur Pembiayaan Daerah Wilyah Pulau Madura	97
4.2.4.1 Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumenep yang tercermin dalam laporan APBD	97
4.2.4.2 Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan yang tercermin dalam laporan APBD	100
4.2.4.3 Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Sampang yang tercermin dalam laporan APBD	104
4.2.4.4 Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan yang tercermin dalam laporan APBD	108
4.2.5 Perbandingan Keuangan Daerah 4 Kabupaten Pulau Madura	112
4.3 Kinerja Keuangan Daerah	114
4.4 Hasil Penelitian	116
4.4.1 Derajat Desentralisasi Fiskal	116
4.4.2 Kemandirian Keuangan Daerah	127
4.4.3 Efektifitas Keuangan Daerah	132
4.4.4 Efisiensi Keuangan Daerah	137
4.5 Pembahasan	142
4.5.1 Gambaran Umum Keuangan Daerah 4 Kabupaten di Pulau Madura	142
4.5.2 Kondisi Lokal dan Keuangan Daerah kabupaten Sumenep	146
4.5.3 Kondisi Lokal dan Keuangan Daerah kabupaten Pamekasan	151
4.5.4 Kondisi Lokal dan Keuangan Daerah kabupaten Sampang	154
4.5.5 Kondisi Lokal dan Keuangan Daerah kabupaten Bangkalan	157
4.5.6 Perbandingan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah 4 Kabupaten Pulau Madura	160
4.5.7 Perbandingan Derajat Desentralisasi Fiskal 4 Kabupaten Pulau Madura.....	165

BAB V	167
PENUTUP	167
5.1 Kesimpulan	167
5.2 Saran	173
Daftar Pustaka	175
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal	24
Tabel 2.2 Pola hubungan tingkat kemandirin keuangan daerah	40
Tabel 2.3 Kriteria efektifitas kinerja keuangan	41
Tabel 2.4 Kriteria Eefisiensi Kinerja Keuangan	42
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu	43
Tabel 3.1 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	55
Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan	56
Tabel 3.3 Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan	57
Tabel 4.1 Surplus Defisit dan Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Sumenep	62
Tabel 4.2 Surplus Defisit dan Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Pamekasan	63
Tabel 4.3 Surplus Defisit dan Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Sampang	64
Tabel 4.4 Surplus Defisit dan Pembiayaan Keuangan Daerah Kabupaten Bangkalan	65
Tabel 4.5 Struktur Pendapatan Daerah Setelah Realisasi Kabupaten Sumenep	66
Tabel 4.6 Struktur Pendapatan Daerah Setelah Realisasi Kabupaten Pamekasan	70
Tabel 4.7 Struktur Pendapatan Daerah Setelah Realisasi Kabupaten Sampang	75
Tabel 4.8 Struktur Pendapatan Daerah Setelah Realisasi Kabupaten Bangkalan	79
Tabel 4.9 Struktur Belanja Daerah Setelah Realisasi di Kabupaten Sumenep	83
Tabel 4.10 Struktur Belanja Daerah Setelah Realisasi di Kabupaten Pamekasan	86
Tabel 4.11 Struktur Belanja Daerah Setelah Realisasi di Kabupaten Sampang	90
Tabel 4.12 Struktur Belanja Daerah Setelah Realisasi di Kabupaten Bangkalan	93
Tabel 4.13 Struktur Pembiayaan Daerah Setelah Realisasi di Kabupaten Sumenep	97
Tabel 4.14 Struktur Pembiayaan Daerah Setelah Realisasi di Kabupaten Pamekasan	100
Tabel 4.15 Struktur Pembiayaan Daerah Setelah Realisasi di Kabupaten Sampang	104

Tabel 4.16 Struktur Pembiayaan Daerah Setelah Realisasi di Kabupaten Bangkalan.....	108
Tabel 4.17 Struktur Keuangan Daerah 4 Kabupaten Pulau Madura setelah realisasi, Tahun 2011-2015	112
Tabel 4.18 Perkembangan Rasio PAD terhadap TPD Kabupaten Sumenep Tahun 2011-2015	118
Tabel 4.19 Perkembangan Rasio BHPBP terhadap TPD Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015	119
Tabel 4.20 Perkembangan Rasio Bantuan terhadap TPD Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015	120
Tabel 4.21 Perkembangan Rasio PAD terhadap TPD Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015	121
Tabel 4.22 Perkembangan Rasio BHPBP terhadap TPD Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015	121
Tabel 4.23 Perkembangan Rasio Bantuan terhadap TPD Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015	122
Tabel 4.24 Perkembangan Rasio PAD terhadap TPD Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015	123
Tabel 4.25 Perkembangan Rasio BHPBP terhadap TPD Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015	124
Tabel 4.26 Perkembangan Rasio Bantuan terhadap TPD Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015	124
Tabel 4.27 Perkembangan Rasio PAD terhadap TPD Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015	125
Tabel 4.28 Perkembangan Rasio BHPBP terhadap TPD Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015	126
Tabel 4.29 Perkembangan Rasio Bantuan terhadap TPD Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015	127
Tabel 4.30 Perkembangan Rasio PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015	129
Tabel 4.31 Perkembangan Rasio PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015	130
Tabel 4.32 Perkembangan Rasio PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015	131
Tabel 4.33 Perkembangan Rasio PAD terhadap Bantuan Pemerintah Pusat Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015	132

Tabel 4.34 Perkembangan Rasio Realisasi PAD terhadap Target Penerimaan PAD Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015	133
Tabel 4.35 Perkembangan Rasio Realisasi PAD terhadap Target Penerimaan PAD Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015	134
Tabel 4.36 Perkembangan Rasio Realisasi PAD terhadap Target Penerimaan PAD Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015	135
Tabel 4.37 Perkembangan Rasio Realisasi PAD terhadap Target Penerimaan PAD Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015	136
Tabel 4.38 Perkembangan Rasio Realisasi Belanja Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015	138
Tabel 4.39 Perkembangan Rasio Realisasi Belanja Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015	139
Tabel 4.40 Perkembangan Rasio Realisasi Belanja Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015	140
Tabel 4.41 Perkembangan Rasio Realisasi Belanja Daerah terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015	141
Tabel 4.42 Perbandingan Rata-rata Tingkat Kemandirian, Efektifitas, dan Efisiensi Keuangan Daerah dalam 4 Kabupaten di Pulau Madura	144
Tabel 4.43 Perbandingan Rata-rata Tingkat PAD dan BPP di Pulau Madura	161-162

GAMBAR GRAFIK

Gambar 4.1 Peta Pulau Madura yang terdiri dari 4 Kabupaten	59
Gambar 4.2 Perkembangan Realisasi Komponen Penerimaan Daerah Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	67
Gambar 4.3 Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	68
Gambar 4.4 Perkembangan Realisasi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	68
Gambar 4.5 Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	69
Gambar 4.6 Perkembangan Realisasi Komponen Penerimaan Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	72
Gambar 4.7 Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	72
Gambar 4.8 Perkembangan Realisasi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	73
Gambar 4.9 Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	74
Gambar 4.10 Perkembangan Realisasi Komponen Penerimaan Daerah Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	76
Gambar 4.11 Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	76
Gambar 4.12 Perkembangan Realisasi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	77
Gambar 4.13 Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	78
Gambar 4.14 Perkembangan Realisasi Komponen Penerimaan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	80
Gambar 4.15 Perkembangan Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	81
Gambar 4.16 Perkembangan Realisasi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	81
Gambar 4.17 Perkembangan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	82

Gambar 4.18 Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	84
Gambar 4.19 Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	84
Gambar 4.20 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015 (Milyar)	85
Gambar 4.21 Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	87
Gambar 4.22 Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	88
Gambar 4.23 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015 (Milyar)	89
Gambar 4.24 Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	91
Gambar 4.25 Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasi Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	91
Gambar 4.26 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung atau Belanja Modal kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015 (Milyar)	92
Gambar 4.27 Perkembangan Realisasi Komponen Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	94
Gambar 4.28 Perkembangan Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	95
Gambar 4.29 Perkembangan Realisasi Belanja Langsung kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015 (Milyar)	96
Gambar 4.30 Perkembangan Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	97
Gambar 4.31 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	98
Gambar 4.32 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah kabupaten Sumenep, Tahun 2011-2015 (Milyar)	99
Gambar 4.33 Perkembangan Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	101
Gambar 4.34 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	102
Gambar 4.35 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah kabupaten Pamekasan, Tahun 2011-2015 (Milyar)	103

Gambar 4.36 Perkembangan Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	105
Gambar 4.37 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	106
Gambar 4.38 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah kabupaten Sampang, Tahun 2011-2015 (Milyar)	107
Gambar 4.39 Perkembangan Realisasi Komponen Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	109
Gambar 4.40 Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	110
Gambar 4.41 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah kabupaten Bangkalan, Tahun 2011-2015 (Milyar)	111
Gambar 4.42 Perkembangan Realisasi Keuangan Daerah 4 Kabupaten Pulau Madura, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	113
Gambar 4.43 Peta Kabupaten Sumenep	146
Gambar 4.44 Peta Kabupaten Pamekasan	151
Gambar 4.45 Peta Kabupaten Sampang	154
Gambar 4.46 Peta Kabupaten Bangkalan	157
Gambar 4.47 Perkembangan Realisasi Perbandingan Kemandirian Keuangan Daerah PAD terhadap BPP dalam 4 Kabupaten di Pulau Madura, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar).	161
Gambar 4.48 Perkembangan Realisasi Perbandingan Derajat Desentralisasi Fiskal BHPBP terhadap TPD dalam 4 Kabupaten di Pulau Madura, Tahun 2011-2015 (Rp. Milyar)	165